Perkawinan Adat “Rasan Jahat” Perspektif Maqashid Syariah (Studi Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin)

Muhammad Afiq Zamzami Mawardi¹, Siti Rochmiyatun², Ari Azhari³, Khairul Fani⁴

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: ¹afiqzamzami@gmail.com, ²sitirochmiyatun_uin@radenfatah.ac.id,

³ariazhari_uin@radenfatah.ac.id, ⁴khairulfani_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak: Perkawinan bagi umat Islam adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas pula dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Agama Islam. Adanya tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat yang lain, dengan adanya perbedaan tata tertib adat tersebut, maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin mempunyai Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dan Kompilasi Adat Istiadat Desa Sako. Pada salah satu bab nya membahas tentang perkawinan adat, di peraturan desa itu menjelaskan bahwa ada 2 jenis rasan perkawinan salah satunya adalah “Rasan Jahat”. Perkawinan Adat “Rasan Jahat” adalah suatu bentuk penyimpangan perkawinan yang terjadi di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Studi ini dilakukan dengan cara mewawancarai informan di lapangan terkait mekanisme perkawinan adat “Rasan Jahat” dalam perspektif Maqashid Syariah dan sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara bersama informan di lapangan, dan juga sumber data sekunder seperti buku, jurnal, media massa, dan peraturan-peraturan yang terkait tentang perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan Adat “Rasan Jahat” disebabkan oleh 2 hal yaitu Pertama, didasarkan karena “Tarikan” perspektif Maqashid Syariah, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga keturunan (hifdz an-nasl). Kedua, Didasarkan Karena Hamil Di Luar Nikah jika dilihat dari Perspektif Maqashid Syariah, perkawinan adat tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum syara’.

Kata Kunci: Adat, Mekanisme, Perkawinan.

Abstract: Marriage for Muslims is something that is very sacred and has a sacred purpose and cannot be separated from the provisions stipulated by Islamic law. The existence of customary marriage regulations between one indigenous community and another, with differences in these customary regulations, often resolves inter-customary marriages into protracted problems. Sako Village, Rambutan District, Banyuasin Regency has Sako Village Regulation Number 05 of 2014 concerning the Existence of Traditional Law Communities and the Compilation of Sako Village Customs. In one of the chapters discussing traditional marriages, the village regulations explain that there are 2 types of marriage feelings, one of which is "Evil Rasan". "Rasan Evil" Traditional Marriage is a form of marital deviation that occurs in Sako Village, Rambutan District, Banyuasin Regency. This research uses a qualitative approach method with the type of field research (Field Research). This study was carried out by interviewing informants in the field regarding the "Rasan Evil" traditional marriage mechanism from the Maqashid Syariah perspective and the primary data sources used were the results of interviews with informants in the field, and also secondary data sources such as books, journals, mass media, and related regulations regarding marriage. The research results show that the "Evil Rasan" Traditional Marriage is caused by 2 things, namely First, it is based on the "Pull" from the Maqashid Syariah perspective, in this case the aim is to protect offspring (hifdz an-nasl). Second, based on being pregnant out of wedlock, when viewed from the Maqashid Sharia perspective, this traditional marriage is not in accordance with the objectives of Sharia law.

Keywords: Customs, Mechanisms, Marriage

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dan menempatkan hukum sebagai kedaulatan bernegara, ciri dari sebuah negara hukum sendiri ialah adanya suatu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, salah satu wujud diselenggarakannya pemerintahan berdasarkan hukum ialah menciptakan, memelihara dan mempertahankan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat.¹ Ada tiga sistem hukum nasional Indonesia yang digunakan di antara masyarakat: Barat, Adat, dan HukAum Agama. Sesuai konstitusinya, Indonesia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa terdepan dari suatu agama tertentu, tetapi memiliki ciri bangsa bangsa dengan nilai-nilai khasnya sendiri.²

Salah satu yang diatur dalam hukum di Indonesia adalah hukum perkawinan, maka perkawinan menjadi sangat penting karena selain harus jelas bibit, bebet, bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bahagia dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah.³

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat dan sesuai dengan kedudukan manusia yang terhormat. Tujuan perkawinan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng. Pelaksanaan perkawinan di kalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkannya ketentuan tentang bagaimana ciri-ciri keluarga sakinah.⁴

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. Dimana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum.⁵ Sebagaimana dalam QS An-Nur 24:32 yang juga menjelaskan tentang perkawinan

¹ Asrianto Zainal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, dalam Jurnal AlIzzah: Jurnal-Jurnal Hasil Penelitian, Volume 11, Nomor 2, 2016, 4.

² Ainun Najib. *Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 4 (2), 2020, 116–26.

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat Cet Ke-2*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 91.

⁴ Nasrullah, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak." *AlQadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9 (1), 2022, 175–90.

⁵ Adityadarma Bagus P.S.P., Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, Rr. Alysia Gita Purwasaputri Dan Aditama Nur Ilham Pramulia. *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020), 3.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”⁶

Untuk mencapai tujuan perkawinan Islam menetapkan berbagai kriteria dan model yang harus diadopsi, direncanakan, dan dilaksanakan, mulai dari pemilihan pasangan hidup, penilaian calon pasangan, rukun dan syarat pernikahan, mahar, dll. Meraih gelar sakinah mawaddah warrahmah bukanlah perkara satu atau dua tahun, melainkan beberapa proses, penuh pengorbanan dan pengabdian, yang dicapai melalui serangkaian langkah, yaitu penawar dalam kehidupan keluarga dan sosial, menghadapi perselisihan keluarga, sikap terhadap diri sendiri, keimanan dan ketakwaan, serta akhlak.⁷

Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ini memiliki Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2014 yang dibuat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kemudian disahkan oleh Kepala Desa yang memiliki wewenang pada Peraturan Desa tersebut yang mengatur tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kompilasi Adat Istiadat Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Peraturan desa itu dibuat dengan alasan untuk melestarikan warisan nenek moyang agar tidak hilang dimakan waktu dan juga sebagai ciri khas desa karena hanya Desa Sako satu-satunya desa yang membukukan adat istiadatnya menjadi peraturan desa. Serta menjadi landasan hukum pemerintahan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pada saat peraturan desa itu dibuat banyak sekali kasus-kasus yang melanggar hukum Islam dan adat yang berlaku seperti perzinahan yang mengakibatkan hamil di luar nikah oleh karena itu pemerintah membuat peraturan desa itu sebagai upaya mereka untuk mencegah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran itu.

Selain itu, perlunya menggunakan *Maqasid Syariah* sebagai pisau analisis, sehingga dapat melihat bagaimana mekanisme perkawinan adat itu jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah* dengan berpegang teguh pada ruang lingkup dan macam-macam unsur *maqashid syariah*. Hal ini membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam perkawinan adat tersebut dalam mencapai kemaslahatan individu dan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam latar belakang diatas, menarik untuk dikaji dan menggali lebih dalam tentang mekanisme perkawinan adat “Rasan Jahat” dalam Peraturan Desa Sako Kecamatan Rambutan

⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta : Lembaga Percetakan AlQur'an Departemen Agama RI, 2009), 549.

⁷ Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, Rafli Fasya, Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakina, *Jurnal Usroh*, Vol-6 No.2 Desember 2022, 161.

Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014, akan digali lebih lengkap dalam perspektif *Maqasid Syariah*.

Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan agar penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat tersusun secara terperinci dan sistematis Fungsi dari metode yaitu agar mempermudah penulis dalam penyusunan penelitian, peneliti dapat terarah dan menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hal ini dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia sebagai data primer, seperti hasil wawancara, data observasi dan temuan penelitian atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸ Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Maksud dari permasalahan yang diteliti adalah untuk mencari bagaimana mekanisme perkawinan adat "Rasan Jahat" dalam Peraturan Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Nomor 05 Tahun 2014 tersebut.

Jenis data yang dipergunakan didalam riset ini yakni data kualitatif. Data kualitatif yakni menganalisis data menurut kualitasnya, kemudian menguraikannya dengan kata-kata untuk memperoleh pembahasan berbentuk kalimat yang terstruktur serta mampu dipahami selanjutnya menarik kesimpulannya. Selain itu, data kualitatif juga terdiri dari data deskriptif kualitatif yang meliputi dokumen pribadi, kutipan pertanyaan informan, komentar dan pertanyaan mengenai dokumen yang bersangkutan, dan lain-lain. sumber pendataan peneliti peroleh langsung dari penelitian di lapangan.⁹ Data primer didapat dari lokasi observasi melalui wawancara yaitur dengan Aparat Desa, Ketua Adat, P2UKD Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang merupakan sumber dari pokok penelitian skripsi ini, data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen resmi, buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum pernikahan adat. Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dimana tempat tersebut merupakan pokok sumber data lapangan yang penulis teliti.

Pengertian Perkawinan Adat "Rasan Jahat"

Di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin mempunyai sebuah Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dan Kompilasi Adat Istiadat Desa Sako, Peraturan Desa tersebut dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian disahkan oleh Kepala Desa, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

⁸ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 64.

⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), 71-71.

6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa tersebut dibuat guna mengatur kehidupan masyarakat adat. Di dalam Peraturan Desa tersebut salah satunya mengatur tentang adat perkawinan, terdapat 2 jenis perkawinan adat salah satunya "Rasan Jahat", Dalam Bahasa Melayu Palembang, kata "Rasan" memiliki artian kehendak atau kemauan, Sedangkan "Jahat" artinya tidak baik atau kurang bagus. "Rasan Jahat" merupakan bentuk penyimpangan dari Adat Perkawinan yang terjadi di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, berdasarkan isi Peraturan Desa pengertian perkawinan adat tersebut dijelaskan didalam Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014 Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Rasan Jahat adalah Acara yang dibuat tidak berdasarkan urutan adat.¹⁰

Pada konsep *mind* (pikiran) masyarakat Desa Sako, Perkawinan Adat "Rasan Jahat" adalah Perkawinan yang diawali oleh perbuatan bujang gadis yang datang ke pemerintahan untuk mendapatkan perlindungan dan meminta untuk dinikahkan, hal ini sering dikenal dengan istilah "Tarikan", dan juga hamil diluar nikah dapat menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Adat "Rasan Jahat". Perkawinan ini dikatakan menyimpang karena perbuatan ini diawali oleh bujang gadis bukan oleh orang tuanya, dimana bujang gadis tersebut langsung meminta perlindungan ke pemerintahan untuk dinikahkan tanpa sepengetahuan orang tua mereka, karena perbuatan bujang gadis tidak menghormati kedua orang tuanya. hal inilah yang menjadi dasar mengapa disebut dengan "Rasan Jahat". Menurut Adat Sako bujang gadis yang menggunakan "Rasan Jahat" konsekuensinya kedua calon pengantin harus membayar uang penginapan dimana tempat mereka meminta perlindungan. Maksud rumah pemerintahan ini bisa pemangku adat, kepala desa, kepala dusun atau ketua RT setempat sebagai tempat mereka meminta perlindungan.¹¹

Dalam Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, yang mengatur "Tarikan" bujang gadis datang kerumah pemerintahan (Pemangku Adat) untuk meminta perlindungan, kemudian pihak pemerintahan membuat surat permohonan maaf dari bujang kepada orang tua gadis karena telah membawa anaknya ke rumah pemerintahan untuk menikah, setelah itu terjadilah musyawarah atau berunding antara pihak pemerintahan, kepala adat dan kedua orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Ini merupakan budaya yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyang. Kendati demikian "Rasan Jahat" inipun akan berujung pernikahan sebagaimana biasa jika kedua pihak keluarga menyetujuinya atau tidak menyetujui. Pihak laki-laki juga tetap memberikan mahar atau pemberian kepada pihak perempuan. Pada Kasus "Tarikan" yang didasarkan karena hamil di luar nikah dikenakan sanksi tambahan yaitu potong

¹⁰ Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab I Ketentuan Umum Pasal (7) dan (8)

¹¹ Data diperoleh dari hasil Wawancara dan Penelitian di Kantor Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan Bapak A Roni Basri, Pada Tanggal 29 Oktober 2024.

kambing dan membayar biaya administrasi, sanksi tersebut wajib dilakukan oleh bujang gadis agar dapat melanjutkan ke prosesi akad nikah.

Mekanisme Perkawinan Adat "Rasan Jahat" Dalam Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014

Perkawinan Adat "Rasan Jahat" Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 2 sebab yaitu pertama, karena "Tarik'an" atau kemauan bujang gadis itu sendiri dan Kedua, Karena Hamil Di Luar Nikah. Dalam Pengaturan Perkawinan Adat "Rasan Jahat" juga mengatur bagaimana mekanisme Perkawinan Adat "Rasan Jahat" yang diatur dalam Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, sebagai berikut :¹²

1. Mekanisme dan Pengaturan Perkawinan Adat "Rasan Jahat" Didasarkan Karena "Tarik'an"

Perkawinan yang diawali "Tarik'an" termasuk ke dalam Perkawinan Adat "Rasan Jahat", dimana "Tarik'an" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh bujang gadis atas kemauannya sendiri untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan isi Pasal dalam Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014 sebagai berikut:

Di dalam Pasal 16 dijelaskan tentang pengertian "Tarik'an", dan kategorinya, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Tarik'an merupakan salah satu bentuk awal dari proses perkawinan adat yang dikelompokkan dalam rasan jahat
- b. Tarik'an ini didasarkan pada empat katagori yaitu :
 - 1) Didasarkan orang tua setuju
 - 2) Didasarkan orang tua tidak setuju
 - 3) Didasarkan karena hamil
 - 4) Didasarkan karena ditangkap
- c. Untuk mewujudkan kehendak perkawinan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mereka dapat meminta perlindungan kepada Pemangku adat/Lembaga adat/Pemerintah desa.¹³

Di dalam Pasal 17 dijelaskan tentang mekanisme "Tarik'an" yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada Tarik'an, Pejabat adat/Pemangku adat memberikan perlindungan setelah ada pernyataan tertulis dari bujang gadis yang bersangkutan bahwa kehendak mereka untuk dikawinkan adalah mereka berdua.
- b. Pada Tarik'an, yang telah memperoleh perlindungan Pejabat adat/Pemangku adat, selanjutnya diberitahukan kepada orang tua/keluarga yang bersangkutan, dan setelah memperoleh persetujuan maka proses penyelesaian selanjutnya adalah proses perkawinan dilaksanakan ditempat /rumah dimana calon kedua

¹² Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab III Bagian Keempat Tentang Perkawinan Adat

¹³ Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab III Bagian Keempat Tentang Perkawinan Adat, Pasal 16

mempelai meminta perlindungan dan membayar biaya sebagai uang penginapan.

- c. Apabila tidak ada persetujuan orang tua/keluarga yang bersangkutan, maka kepala Desa bersama pemangku adat memproses perkawinan bujang gadis tersebut ke kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁴

Di dalam Pasal 18 dijelaskan tentang sanksi bagi yang melanggar, yang diuraikan sebagai berikut: Tidak boleh dirayakan, hanya sebatas dinikahkan saja. Pernikahan dilaksanakan ditempat dimana bujang gadis minta perlindungan atau di kantor desa.¹⁵

Isi dari Pasal 16 ayat (1),(2),(3) di atas menguraikan tentang pengertian "Tarik'an", sederhananya "Tarik'an adalah tindakan bujang gadis atas kehendaknya sendiri yang datang ke pemerintahan untuk dinikahkan, kemudian ada empat kategori penyebabnya, yaitu didasarkan orang tua setuju, didasarkan orang tua tidak setuju, didasarkan hamil, didasarkan karena ditangkap. Dan mereka dapat meminta perlindungan kepada pejabat atau pemangku adat. Realitanya di lapangan kasus "Tarik'an" ini masih ada dan sering terjadi.

Isi dari Pasal 17 ayat (1), (2), (3) di atas menguraikan tentang mekanisme "Tarik'an", pertama, bujang gadis diberikan perlindungan setelah ada pernyataan tertulis dari mereka yang berisi tentang kehendak mereka sendiri untuk menikah, kedua, diberitahukan kepada orang tua mereka, setelah memperoleh persetujuan maka proses selanjutnya adalah proses perkawinan, ketiga, apabila tidak ada persetujuan maka akan dinikahkan di KUA menggunakan wali hakim.

Isi Pasal 18 ayat (1) di atas menguraikan tentang sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan "Tarik'an" yaitu pernikahannya tidak boleh dirayakan atau diresepsikan, hanya dinikahkan saja, pernikahan dilaksanakan sesuai tempat dimana bujang gadis meminta perlindungan atau di kantor desa.

Pada fakta yang terjadi di lapangan, pemerintah sangatlah menjalankan isi pasal di atas, pemerintah tidak pandang bulu kepada siapapun yang melanggar pasal tersebut, apabila terbukti melanggar tidak ada keringanan apapun. Kemudian yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang telah diatur dalam Pasal tersebut. Oleh karena itu masyarakat Desa Sako sangat menjunjung tinggi dan mematuhi.

2. Mekanisme Dan Pengaturan Perkawinan Adat "Rasan Jahat" Didasarkan Karena Hamil Di Luar Nikah

¹⁴ Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab III Bagian Keempat Tentang Perkawinan Adat, Pasal 17

¹⁵ Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab III Bagian Keempat Tentang Perkawinan Adat, Pasal 18

Perkawinan yang diawali hamil di luar nikah termasuk ke dalam Perkawinan Adat "Rasan Jahat", dimana hamil di luar nikah adalah suatu perbuatan yang tabu, yang sangat dilarang oleh agama Islam. Hal ini sejalan dengan isi Pasal dalam Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014 sebagai berikut:

Di dalam Pasal 17 dijelaskan tentang kewajiban pejabat/pemangku adat, yang diuraikan sebagai berikut:

Pada Tarik'an yang didasarkan hamil dan di tangkap oleh petugas maka Pejabat/Pemangku adat harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan segala hal ikhwal mereka itu dengan ketentuan dan sanksi.¹⁶

Di dalam Pasal 23 menjelaskan apabila bujang menggauli gadis dan mengakibatkan gadis hamil maka pejabat/pemangku adat dan pemerintah desa harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan segala hal ikhwal perkawinan mereka itu dengan ketentuan dan sanksi, Yaitu:

- 1) Bujang gadis ini hanya di nikahkan saja dan tidak diizinkan bersanding dipelaminan dan tidak diizinkan untuk mengadakan perayaan (Resepsi).
- 2) Menyembelih kambing ukuran syarat korban masing- masing 1 Ekor.
- 3) Apabila kehamilan sigadis sudah mencapai 6 bulan terhitung dari pelaksanaan akad nikah maka jika anak yang dikandungnya lahir maka orang tuanya diakad nikahkan ulang dan jika anak yang dilahirkan perempuan maka anak ini pada saat akan menikah wali nikahnya harus dengan wali hakim.
- 4) Membayar administrasi adat sebesar Satu juta rupiah.¹⁷

Di dalam Pasal 24 dijelaskan tentang pemecahan masalah dari pejabat/pemangku adat apabila kondisinya sebagai berikut:

- 1) Apabila bujang/laki - laki menggauli gadis dan mengakibat gadis hamil dan bujang/laki- laki tidak bertanggung jawab(mungkir/ingkar), maka pejabat/pemangku adat memberikan penyelesaian.
- 2) jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan pejabat/pemangku adat dan pemerintah desa dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.¹⁸

Di dalam Pasal 25 dijelaskan tentang penyelesaian masalah kalau kondisinya bujang atau laki-laki datangan menggauli gadis atau perempuan yang mengakibatkan hamil, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apabila Bujang/Laki laki datangan menggauli Gadis/Perempuan yang berakibat gadis/perempuan hamil dan keduanya melaksanakan perkawinan di luar desa, maka pejabat adat/Pemangku adat dapat menyelesaikan dengan

¹⁶ Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab III Bagian Keempat Tentang Perkawinan Adat, Pasal 17

¹⁷ Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab III Bagian Keempat Tentang Perkawinan Adat, Pasal 23

¹⁸ Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab III Bagian Keempat Tentang Perkawinan Adat, Pasal 24

orang tuanya secara adat dengan Tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Isi dari Pasal 17 ayat (4) di atas menguraikan tentang kewajiban atau hal yang harus dilakukan oleh pejabat atau pemangku adat untuk memberikan perlindungan dan menyelesaikan segala hal ikhwal mereka dengan ketentuan dan sanksi yang telah diatur. Fakta di lapangan pejabat atau pemangku adat memang menjalankan kewajiban mereka.

Isi Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4) di atas menguraikan tentang sanksi yang akan didapatkan apabila bujang menggauli gadis dan mengakibatkan gadis hamil, sanksinya yaitu pernikahannya tidak boleh dirayakan atau diresepsikan, hanya dinikahkan saja, dan diwajibkan untuk menyembelih kambing masing-masing 1 ekor. Dan apabila kehamilan sigadis sudah mencapai 6 bulan terhitung dari pelaksanaan akad nikah, pada saat anak yang dikandungnya lahir maka orang tuanya diakad nikahkan ulang, dan jika anak yang dilahirkan perempuan maka anak itu pada saat akan menikah wali nikahnya harus dengan wali hakim. dan membayar biaya administrasi Fakta di lapangan hal ini memang ditaati dan dilakukan oleh masyarakat yang melanggar pasal tersebut.

Isi dari Pasal 24 ayat (1), (2) di atas menguraikan tentang pemecahan masalah dari pejabat atau pemangku adat apabila kondisinya bujang atau laki-laki tidak bertanggung jawab (mangkir atau ingkar) maka pejabat atau pemagku adat harus memberikan penyelesaian, kemudian jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan pejabat atau pemangku adat dan pemerintah desa dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Isi dari Pasal 25 ayat (1) di atas menguraikan tentang penyelesaian masalah kalau kondisinya bujang atau laki-laki datangan menggauli gadis atau perempuan yang mengakibatkan hamil dan keduanya melaksanakan perkawinan di luar desa, maka pejabat atau pemagku adat dapat menyelesaikan dengan orang tuanya secara adat dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada fakta yang terjadi di lapangan, pemerintah sangatlah menjalankan isi pasal di atas, pemerintah tidak pandang buluh kepada siapapun yang melanggar pasal tersebut, apabila terbukti melanggar tidak ada keringanan apapun. Kemudian yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang telah diatur dalam Pasal tersebut. Oleh karena itu masyarakat Desa Sako sangat menjunjung tinggi dan mematuhi.

Pada Pembahasan ini adanya Perkawinan Adat "Rasan Jahat" itu didasarkan 2 penyebab yaitu karena "Tarik'an" dan Hamil Di Luar Nikah sesuai isi dari Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014. Maka Perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan Adat "Rasan Jahat" Didasarkan Karena "Tarikan"

¹⁹ Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014, Bab III Bagian Keempat Tentang Perkawinan Adat, Pasal 25

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan terkait perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena "Tarikan", dapat disimpulkan bahwa mekanismenya: Pertama, sepasang kekasih mendatangi rumah pemerintahan atau pemangku adat untuk meminta perlindungan agar dinikahkan hal ini tanpa sepengetahuan kedua orang tua mereka. Kedua, pihak pemerintahan atau pemangku adat membuat surat permohonan maaf dari pihak laki-laki kepada kedua orang tua pihak perempuan. Ketiga, pihak pemerintahan atau pemangku adat memanggil kedua orang tua mereka untuk datang dan berunding untuk membuat kesepakatan. Keempat, setelah kedua orang tua datang dirumah pemerintahan atau pemangku adat setempat, maka terjadilah perundingan diantara mereka mengenai kehendak anak mereka yang ingin dinikahkan segera, apapun yang menjadi hasil perundingan, sepasang kekasih tersebut tetap dinikahkan, pernikahan adat "Rasan Jahat" tersebut tetap memehuni rukun dan syarat sah perkawinan Islam, hanya saja tidak bisa melaksanakan prosesi adat yang telah diatur dalam peraturan desa nomor 05 tahun 2014.

Mekanisme perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena "Tarikan" berdasarkan simpulan diatas jika dilihat dari perspektif *maqasid syariah*, dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga beberapa aspek kemaslahatan. *Maqashid Syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Berikut adalah penjelasan mekanisme perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena "Tarikan" berdasarkan perspektif *maqashid syariah*:

- 1) *Hifdh ad-Din* (Menjaga Agama) menjadi bagian utama teori *maqasid syariah* yang harus ada dalam mekanisme perkawinan adat "Rasan Jahat". Yang dimaksud menjaga agama disini adalah setiap tingkah laku manusia tidak boleh mencela dan merendahkan agama. Yang bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran agama berupa zina. Menjaga nama baik agama ini juga termasuk tujuan dari "Tarikan". Dalam mekanisme perkawinan adat "Rasan Jahat" mengedepankan rasa kekeluargaan, yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang tua kemudian berunding untuk membuat kesepakatan.
- 2) Teori *maqasid syariah* mengharuskan terpenuhinya unsur *Hifdh an-Nafs* (Menjaga Jiwa/kelangsungan hidup) dalam pelaksanaan perkawinan adat "Rasan Jahat" yang disebabkan karena "Tarikan". Sikap yang dilakukan oleh pemerintah atau pemangku adat terhadap para pelanggar hukum ini adalah menikahkan mereka untuk menjamin keberlangsungan hidupnya.
- 3) Unsur *Hifdh an-Nasl* (Menjaga Keturunan) menjadi bagian penting dari teori *maqasid syariah*. Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi. Diantara untuk melindungi dan menjaga keturunan atau

keluarga. Jadi kita harus berhati-hati terhadap apa yang dapat merusak hubungan dengan keturunan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim merusak nasab kita sendiri, serta tujuan ditegakkannya adalah menjaga keturunan, supaya sepasang- laki-laki dan perempuan yang belum halal tidak melakukan zina yang mengakibatkan kotornya keturunan jika terjadi kehamilan. "Tarikan" merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya perbuatan yang telah dilarang keras oleh agama, sosial dan masyarakat.

b. Perkawinan Adat "Rasan Jahat" Didasarkan Karena Hamil Di Luar Nikah

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan terkait perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena hamil di luar nikah, dapat disimpulkan bahwa mekanismenya sama seperti "Tarikan" hanya saja ada sanksi adat tambahan yang akan didapatkan oleh pelanggar hukum adat ini berupa memotong kambing masing-masing satu ekor dan membayar biaya administrasi, setelah sanksi adat tersebut dipenuhi barulah mereka dapat dinikahkan dan tetap sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut Islam.

Melihat penjelasan yang telah dipaparkan di atas, sepasang laki-laki dan perempuan yang telah terbukti melanggar suatu peraturan yang disepakati boleh dan hukumnya bisa menjadi wajib jika ditinjau dari sudut pandang Maqashid al-Syari'ah. Berikut adalah penjelasan mekanisme perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena hamil di luar nikah berdasarkan perspektif *maqashid syariah*:

- 1) Unsur *hifdh al-Aql* (Menjaga Akal) menjadi bagian penting unsur *maqasid syariah*. Apabila dikaitkan dengan perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena hamil di luar nikah, Penjagaan terhadap akal juga dapat dilakukan dengan cara menikahkan sepasang laki-laki dan perempuan yang telah berzina karena intervensi masyarakat lebih kuat untuk menekan seorang laki-laki agar mau bertanggung jawab atas wanita yang telah ia hamili dengan alasan tidak sedikit wanita yang di luar hamil di luar nikah itu menjadi depresi atau stress.
- 2) Teori *maqashid syariah* mengharuskan terpenuhinya unsur *Hifdh an-Nafs* (Menjaga Jiwa/kelangsungan hidup) dalam pelaksanaan perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena Hamil di luar nikah. Sikap yang dilakukan oleh pemerintah atau pemangku adat terhadap para pelanggar hukum ini adalah menikahkan mereka untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Dan kemudian sikap tanggung jawab laki-laki yang telah menghamili perempuan untuk menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup anak dan iselamanya.

Perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena hamil diluar nikah tidak sejalan dengan unsur *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz*

ad-din (menjaga agama) karena sepasang kekasih melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara yang menyebabkan kotornya keturunan mereka karena didapatkan dari hasil hamil di luar nikah.

Adapun cara-cara yang diajarkan Islam adalah menikah, merawat keturunan, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga harga diri dan lain-lain. Salah satu komponen *maqashid syariah* tahsiniyat adalah hifdzu an-nast atau melindungi keturunan atau generasi. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya memperdulikan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Islam juga mendorong kita untuk memerhatikan masa depan keturunan kita misalnya larangan zina, yang bermaksud untuk menjaga keturunan. Kredibilitas garis keturunan merupakan salah satu maksud mengapa zina dilarang. Jika seseorang melahirkan anak yang berasal dari pasangan tidak sah, maka anak yang dihasilkan tidak memiliki garis keturunan yang sah secara hukum dan sosial. Selain itu, anak juga tidak memiliki akta kelahiran dapat beresiko kehilangan hak dasarnya. Lebih lanjut, hak waris tidak dapat diberikan kepada anak.²⁰

Kesimpulan

Perkawinan Adat "Rasan Jahat" dalam Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014 memiliki mekanisme sebagai berikut: Pertama, Bujang gadis mendatangi rumah pemerintahan untuk meminta perlindungan untuk dinikahkan. Kedua, Kemudian pihak pemerintahan membuat surat permohonan maaf dari pihak laki-laki yang akan dtujukan kepada kedua orang tua pihak perempuan. Ketiga, Selanjutnya Pihak Pemerintah melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tua mereka untuk berunding guna membuat kesepakatan untuk menikahkan anak mereka. Keempat, Adapun sanksi adat tambahan yang akan didapatkan oleh pelanggar hukum adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena hamil di luar nikah berupa memotong kambing masing-masing satu ekor dan membayar biaya administrasi, setelah sanksi adat tersebut dipenuhi barulah mereka dapat dinikahkan. Perkawinan Adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena "Tarikan" tetap sejalan dengan aspek *Maqashid Syariah*, dengan kata lain tidak ada pelanggaran atau penyimpangan yang disebabkan oleh perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena "Tarikan", tetapi sebaliknya apabila Perkawinan Adat "Rasan Jahat" tersebut didasarkan karena hamil di luar nikah hanya ada dua aspek yang tetap terjaga, Hifdz Al- Aql (Menjaga Akal) dan Hifdz An-Nafs (Menjaga Jiwa) Perkawinan adat "Rasan Jahat" yang didasarkan karena hamil diluar nikah tidak sejalan dengan unsur hifdz an-nasl (menjaga keturunan), hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz al-mal (menjaga harta) karena sepasang kekasih melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara yang menyebabkan kotornya

²⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019), 56.

keturunan mereka karena didapatkan dari hasil hamil di luar nikah dan harus membayar biaya sanksi.

Referensi

- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat I*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Galang Taufani, Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh, Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2015.
- Kasmawati, Aprilianti. *Hukum adat di Indonesia*, Lampung: Pustaka Media, 2022.
- Laksanto, Utomo. *Hukum Adat Cet Ke-2*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sapto Sigit. dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Saravistha, Deli B., et al. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cv Widina Media Utama, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2021.
- Soemadiningrat, Otje R. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, Cet Ke 2*, Bandung: Alumni, 2002.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Wafa, Ali Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia: Tangerang Selatan, 2018.
- Yulia, S. *Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Adityadarma Bagus P.S.P., Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, Rr. Alysia Gita Purwasaputri Dan Aditama Nur Ilham Pramulia. *Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020), 3. Diakses pada 13 Oktober 2024, Diunduh di <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/250>
- Akmal Abdul Munir, *Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah*. Jurnal Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember 2021. Diakses pada 19 Oktober 2024, Diunduh di <https://media.neliti.com/media/publications/398305-pemikiran-sayyid-sabiq-mengenai-hikmat-a-a29cffaf.pdf>
- Anisa, Nurbaiti. Tamuddin, M. Wijaya, Sandi. *Pernikahan Dalam Mahram Murshahah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buray Pemaca Kabupaten Oku Selatan, Jurnal Usroh*, Vol-5 No.2, Desember 2021. Diakses pada 19 Oktober 2024, Diunduh

- di<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/10682>
- Fatkhul Muin, R. S. M. *Desa Dan Hukum Adat: Persepektif Normativitas Dan Sosiologis Keindonesiaan. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Papers*. (2016). Diakses pada 20 Oktober 2024, Diunduh di <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4229>
- Junaidi, Heri. Armasito. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Permenhub Nomor Pm 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19". *Jurnal Muamalah* Volume 7, Nomor 1, Juni 2021. Diakses pada 20 Oktober 2024, Diunduh di <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/9275/3995>
- Kumalaningdyah, Nur. *Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 26 September 2019. Diakses pada 25 Oktober 2024, Diunduh di <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/11360/9898/35307>
- L. S, Putri. *Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 2019. Diakses pada 24 Oktober 2024, Diunduh di <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/6804/4522>
- Fatmaningtyas, Dewi Ratna. *Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah*, *Skripsi*, UIN, 2022, 43. Diakses pada 01 Juli 2024, Diunduh di <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38145>
- Batara, Evie Tenri Besse. *Analisis Urf Terhadap Praktek Adat Dipasiala Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis (Studi Kasus Air Solok Batu Kabupaten Banyuasin)*. *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2023. Diakses 01 Juli 2024, Diunduh di <https://repository.radenfatah.ac.id/37637>
- Irhamzah, *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat Dan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018. Diakses pada 01 Juli 2024, Diunduh di <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazhib/article/view/1344>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dan Kompilasi Adat Istiadat Desa Sako.